

WAHYU PRIBADI. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014. EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERDA KOTA MALANG NO.8 TAHUN 2010 TERKAIT PERTIMBANGAN ASPEK ZONASI DALAM PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)

Dibawah Bimbingan : 1.Dr. Istislam, SH. M.Hum

2. Lutfi Effendi, SH. M.Hum

Abstrak

Pasar merupakan pusat aktivitas perdagangan tertua di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Permasalahan yang terkait pada pasar tradisional mengalami beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional serta persaingan dengan ritel skala besar (mal, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan) juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini 1) Memahami dan menganalisis efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM di Kota Malang. 2) Memahami dan menganalisis upaya BP2T Kota Malang sebagai peran maksimal dalam konteks pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM. 3) Menemukan, memahami, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BP2T Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM.

Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji Pertimbangan Aspek Zonasi dalam Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perda Jawa Timur No.3 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan penataan pasar modern dan upaya perlindungan terhadap pasar tradisional. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Terdapat beberapa kelemahan mendasar yang ditemukan sehingga menyebabkan aturan tersebut kurang efektif. Temuan tersebut adalah: 1) IUTM dan SIUP tidak memiliki perbedaan mendasar dan memiliki substansi sebagai dasar hukum pendirian usaha perdagangan. 2) Adanya pandangan bahwa kajian tentang dampak sosial ekonomi sulit dilaksanakan dan menyita banyak waktu. Hambatan teknis terutama pada perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja (Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP). Hambatan lain berkaitan erat dengan aspek koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T dengan Disperindag yang pada

dasarnya mengarah pada koordinasi antara dua SKPD tersebut menurut penulis masih kurang luas.

Wahyu pribadi. Country Administration Law, University Faculty Of Law Brawijaya, February 2014. Effectiveness Section 25 Verse (1) Perda Malang City No. 8 Year 2010 Related Aspect Deliberation Zonasi In Modern Store Effort Permission Publication (IUTM) (Study At Malang City Inwrought Licensing Service Body)

Dibawah Bimbingan : 1. Dr. Istislam, SH. M.Hum

2. Lutfi Effendi, SH. M.Hum

Abstract

Market is eldest trade activity centre in Indonesia, even in all the world. related troubleshoot in tradisional market experiences several troubleshoots related to market internal problem likes market management obsolescence, tool and market infrastructure very minimum, tradisional market as dairy cattle for tax acceptance, mushroom it cloister tradesman (PKL) that decrease market tradesman customer, and the minimum capitalization aid available for tradisional tradesman with rivalry with ritel big scale (mal, supermarket, department store, shopping center/expenditure centre) also be troubleshoot that must be finished by local government.

Aim from this watchfulness 1) Realizes and analyze effectiveness section 25 verse (1) perda Malang city no. 8 year 2010 related aspect deliberation zonasi in publication IUTM at Malang city. 2) Realize and analyze efforts BP2T Malang city as maximal character in aspect deliberation context zonasi in publication IUTM. 3) find, realize, and analyze obstacles that faced by BP2T Malang city in increases effectiveness section 25 verse (1) Perda Malang city no. 8 year 2010 related aspect deliberation zonasi in publication IUTM.

Watchfulness is done to use method approaches juridical sosiologis, that is approach watchfulness mengkaji aspect deliberation zonasi in modern store effort permission publication (IUTM) based on section 25 verse (1) perda east java no. 3 year 2008 in the hook with configuration modern market and protection efforts towards tradisional market. data that got in this watchfulness furthermore is cultivated menggunakan qualitative descriptive analysis method.

Found several weakness mendasar that found so that causes rules less effective. finding: 1) IUTM and siup doesn't has difference mendasar and has substansi as trade effort opinion legal fundament. 2) Opinion existence that study about difficult economy social impact is carried out and seize many times. technical obstacle especially in law ware that is base work execution (tupoksi BP2T also spp and soup). obstacle other related tight with coordination aspect delivers institution especially between BP2T with menyperindag which is on base it aim in coordination between two skpd follow author stills less vast.

